

**Judul** : Percepat RUU EBET, transisi energi baru butuh payung hukum  
**Tanggal** : Selasa, 12 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Percepat RUU EBET

## Transisi Energi Baru Butuh Payung Hukum

ANGGOTA Komisi XII DPR Eddy Soeparno mendorong percepatan transisi energi fosil ke energi terbarukan melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Beleid ini perlu segera dituntaskan guna meminimalisir kerugian yang akan dialami Indonesia.

Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan, dampak negatif perubahan iklim sudah meluas dan nyata dirasakan Indonesia.

"Karena itu, kami menginisiasi payung hukum yang memberikan kepastian bahwa kita melakukan transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan," ujarnya, Senin (11/8/2025).

Eddy mengakui, transisi menuju energi terbarukan menghadapi sejumlah kendala, mulai dari biaya pengembangan yang tinggi hingga keterbatasan infrastruktur seperti jaringan transmisi. Namun, transisi energi tidak boleh ditunda karena

dampaknya akan luas.

Menurutnya, dampak perubahan iklim tak hanya menyerang sektor ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat, kualitas pertanian, investasi, hingga perdagangan internasional.

"Saya berharap dalam satu dua masa sidang ke depan ini harus selesai. Kalau nggak, Indonesia akan rugi," tegasnya.

Eddy menambahkan, penanganan krisis iklim juga akan dilakukan melalui RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI). Legislatif dapat mendorong RUU PPI agar bisa mengikuti RUU EBET, sehingga transisi energi bisa berjalan lebih cepat.

"Demi perbaikan kualitas udara kita, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup," tuturnya.

Senada, anggota Komisi XII DPR Jalal Abdul Nasir mengajak seluruh pihak bekerja sama mengatasi krisis iklim. Kolaborasi lintas sektor tidak



Eddy Soeparno

hanya bertujuan memenuhi target iklim, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kita harus bergerak dalam satu visi untuk menjaga lingkungan, mempercepat transisi energi bersih dan melindungi sumber daya alam yang jadi

penopang hidup kita," ucap politikus PKS itu.

Anggota Komisi XII DPR Nurwayah menambahkan, perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan persoalan nyata yang sehari-hari dirasakan warga, termasuk di Jakarta, seperti polusi dan banjir.

"Komitmen saya adalah memastikan proses legislasi berjalan adil, inklusif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan," tutur politikus Partai Demokrat itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan perkembangan pembahasan RUU EBET. Menurutnya, ada kemungkinan pembahasan RUU Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk meningkatkan lifting migas, namun belum diketahui kapan akan direvisi.

"Ada kemungkinan, tetapi saya belum bisa menjawab kapan direvisi," kata Bahlil.

Meski begitu, Bahlil menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) pada 2060 atau lebih cepat. Caranya dengan meningkatkan bauran energi terbarukan dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada. ■ PYB